

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasi tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, sehingga dengan persentase yang lebih besar pada kegiatan praktik diharapkan mahasiswa dapat lebih memperdalam pengetahuan dunia kerja serta skill- skill yang linier dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Salah satu bentuk implementasi dari program pendidikan vokasi ini adalah diselenggarakannya Program Magang wajib bagi mahasiswa dan merupakan syarat mutlak kelulusan.

Program magang ini dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang dilaksanakan pada semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan (D-IV) termasuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Kegiatan magang dalam Program Studi Akuntansi Sektor Publik memiliki besaran bobot yakni 20 SKS yang setara dengan  $\pm$  700 jam magang atau setara dengan 4 bulan efektif. Sejalan dengan konteks Program Studi Akuntansi Sektor Publik yakni dengan memfokuskan pada organisasi nirlaba. Salah satu organisasi nirlaba tersebut adalah instansi pemerintahan yakni Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur karena sesuai dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Kegiatan magang pada Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan selama 4 bulan dimulai pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan, bahwa Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Jawa Timur selaku pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta bertindak sebagai bendahara umum.

Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan pasal 2 menyatakan bahwa Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Jawa Timur memiliki ruang lingkup yang menjadi kewenangan salah satunya yakni pembinaan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/ Kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Jawa Timur didukung oleh Bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota (BK3).

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota (BK3) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada Bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota (BK3) yang dilakukan lebih kompleks mulai dari Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan pertanggung jawaban, salah satu pembinaan yang dilakukan yakni mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) menurut Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 316 perubahan dapat dilakukan ketika adanya keadaan dan perkembangan dalam suatu daerah. Adapun proses dari Perubahan APBD ini paling akhir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 adalah diakhiri bulan September. Selama magang pada Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur pada bulan September tergolong ramai banyak Instansi Pemerintah Kabupaten/

Kota Mengirim dokumen Perubahan APBD. Namun dalam hal ini tetap banyak saja Kabupaten/ Kota yang mengirimkan dokumen perubahan APBD yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah diatur, oleh karena itu peranan BPKAD penting dalam memantau dan membina jalannya proses penyusunan perubahan APBD.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik mengambil judul mengenai **“Alur Pembinaan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Pada Badan Pengelolaan Dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur”**

## **1. 2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Magang Umum**

Tujuan magang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan cara berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja, serta membandingkan dan mengintegrasikan teori yang dipelajari dengan praktik yang diterapkan di dunia industri atau lembaga tempat magang. Selain itu, magang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman terhadap dinamika, budaya, dan etika profesional di tempat kerja, meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi, sekaligus membangun pengalaman dan jaringan profesional sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

### **1.2.2 Tujuan Khusus Magang**

Tujuan khusus Magang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peserta Magang selain tujuan umum. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam metode pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bina Keuangan Kabupaten/ Kota.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam pembinaan penyusunan perubahan APBD Pada Badan Pengelolaan Dan kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

### 1.2.3 Manfaat Magang

Program magang yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jember tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Baik dari segi mahasiswa, Politeknik Negeri Jember serta instansi lokasi tempat magang. Adapun manfaat magang yang diharapkan:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - a. Mahasiswa dapat menerapkan dan memahami teori yang dipelajari di perkuliahan dengan situasi nyata dalam dunia kerja
  - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan serta melakukan eksplorasi pengetahuan baru serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja
  - c. Mahasiswa terlatih untuk berpikir kreatif dan solutif dalam menghadapi problem kerja setelah lulus
2. Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember
  - a. Memberikan gambaran bagi Politeknik Negeri Jember terkait pengembangan dalam dunia kerja yang perlu dipersiapkan dalam kurikulum pendidikan agar nantinya lulusan Politeknik Negeri Jember Mampu Bersaing dalam dunia kerja
  - b. Terjalinnya hubungan baik dan kerja sama antara instansi magang dengan Politeknik Negeri Jember dalam membuka peluang kerja untuk lulusan
3. Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Dan Kekayaan Aset Daerah
  - a. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pada bidang yang ditempati dengan wawasan sumber daya baru dan berbeda yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan layanan kedepannya
  - b. Instansi dapat menjalin hubungan baik dengan Politeknik Negeri Jember sehingga dapat menjalin hubungan dan manfaat secara berkepanjangan

### 1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi magang adalah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 4 bulan atau sama dengan  $\pm 700$  jam

kerja efektif. Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2025 pada Bidang Pembinaan Kabupaten/ Kota (BK3) berikut ini adalah detail lokasi dan waktu magang:

- a. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa timur
- b. Alamat Instansi : Jl. Johar No.19-21, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
- c. Alamat *Website* : <https://bpkad.jatimprov.go.id>
- d. Alamat email : [bpkad@jatimpemprov.go.id](mailto:bpkad@jatimpemprov.go.id)
- e. Waktu Pelaksanaan : Dimulai pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2025

#### **1.4 Metode pelaksanaan**

Metode pelaksanaan magang pada Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Jawa timur sebagai berikut:

##### **1.4.1 Pembekalan Magang**

Pembekalan magang merupakan tahapan penting yang berfungsi sebagai jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja. Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional sebelum memasuki lingkungan kerja nyata. Melalui pembekalan, mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang tujuan dan manfaat magang, tata tertib, serta prosedur administratif yang harus dipatuhi. Selain itu, pembekalan juga memberikan penjelasan mengenai etika dan budaya kerja di tempat magang, cara berkomunikasi secara efektif dengan atasan maupun rekan kerja, serta strategi menghadapi permasalahan yang mungkin timbul selama magang berlangsung. Dalam pembekalan ini, mahasiswa biasanya juga diberikan arahan mengenai pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan baru. Dengan adanya pembekalan magang, diharapkan mahasiswa tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan emosional untuk berkontribusi secara nyata di dunia profesional. Pada akhirnya, pembekalan magang membantu mahasiswa mengubah teori yang telah dipelajari di bangku

kuliah menjadi pengalaman praktis yang bernilai, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti.

#### 1.4.2 Pelaksanaan Magang

Mahasiswa atau peserta magang akan melaksanakan kegiatan magang selama 4 bulan penuh dengan durasi waktu 700 jam ekuivalen 20 SKS pada semester ganjil. Pembagian magang dalam Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan proposal yang dibuat pada saat awal akan melaksanakan magang, penempatan mahasiswa magang dalam BPKAD Provinsi Jawa Timur ini adalah Bina Keuangan Kabupaten/ Kota (BK3).

Pelaksanaan magang sesuai dengan ketentuan instansi di khususkan bagi anak magang sesuai jam kerja karyawan instansi dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk kegiatan mahasiswa magang setiap harinya dicatat dalam *logbook* harian yang diupload dalam Gdrive yang nantinya akan dibaca oleh dosen pembimbing

Dalam hal ini peserta magang menggunakan ketentuan seragam yang dipilih dalam instansi BPKAD Provinsi Jawa Timur Sebagai Berikut:

Senin : Atasan kemeja putih dan bawahan kain hitam  
 Selasa : Atasan hitam bawahan kain Abu- abu  
 Rabu : Seragam Program Studi  
 Kamis : Atasan Biru Tua bawahan Kain Abu- abu  
 Jumat : Atasan Kaos Putih dan Celana Gelap (Olahraga)  
 Atasan Batik bawahan kain Hitam

Tabel 1. 1 Metode Pelaksanaan Magang

No.	Waktu Pelaksanaan	Unit Kegiatan	Kegiatan	Penanggung-jawab
1	1 September s/d 30 September 2025	Bina Keuangan Kab/ Kota	Kegiatan yang dilakukan pada bulan September berkaitan dengan bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota meliputi: 1. Mempelajari peraturan Permendagri 15 tahun 2025	

			2. Administrasi surat mengenai Raperda P-APBD 3. Mengisi format konsultasi dengan Kemendagri mengenai P-APBD 4. Administrasi perjalanan dinas
2	1 Oktober s/d 31 Oktober 2025	Bina Keuangan Kab/ Kota	Kegiatan yang dilakukan pada bulan Oktober berkaitan dengan bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota meliputi: 1. membaca peraturan terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026 2. membantu menyusun draf konsultasi postur PAPBD 2025 3. memverifikasi berkas mengenai Raperda kabupaten Lumajang 4. rapat konsultasi DPRD terkait rancangan Perda APBD TA 2026
3	1 November s/d 30 November 2025	Bina Keuangan Kab/ Kota	Kegiatan yang dilakukan pada bulan November berkaitan dengan bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota meliputi: 1. Rapat umum mengenai rapat kordinasi dan fasilitasi penningkatan kualitas penyajian LKPD Kab/Kota Se jawa timur bersama BPK dan inspektorat

---

			2. membaca peraturan mengenai Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tata cara Evaluasi R- PAPBD
4	1 Desember s/d 31 Desember 2025	Bina Keuangan Kab/ Kota	<p>Kegiatan yang dilakukan pada bulan November berkaitan dengan bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menginput format konsultasi ke Kemendagri mengenai postur APBD 2026, input tematik APBD, dan Program Prioritas nasional Tahun Anggaran 2026</li> <li>2. Administrasi Rancangan Perda dan Perbub Terkait APBD Tahun Anggaran 2026 Kepada Biro Hukum Dan Asisten Administrasi Umum</li> <li>3. Mengkroscek Raperbub Dan Reperda APBD Tahun Anggaran 2026</li> </ol>

---